

Budaya Feodalisme di Pondok Pesantren Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan

Aditiya Rawandi

Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Jl. Mayasih No.11, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan, Jawa Barat
adityarawandi@gmail.com

Abstract

Pesantren salaf is a traditional Islamic educational institution that places kiai in a central position. This dominance raises concerns about hierarchical relationships that are considered a form of feudalism, especially after the rise of violence in pesantren environments. The lack of academic studies on this issue has prompted research to examine the existence and forms of feudalism in pesantren. This study aims to (1) explore the existence of feudalism culture in Islamic boarding schools in Kadugede Subdistrict, Kuningan Regency; (2) describe the forms of feudalism culture in Islamic boarding schools in Kadugede Subdistrict, Kuningan Regency; and (3) identifying the factors that cause feudalism to persist in Islamic boarding schools in Kadugede Subdistrict, Kuningan Regency. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques were carried out through observation, in-depth interviews, and documentation. The research subjects consisted of nine informants from three Salafi Islamic boarding schools in Kadugede Subdistrict. The informants included kiai/boarding school leaders, administrators, and students. The results of the study show that (1) The existence of feudalism in Islamic boarding schools is rooted in classical boarding school traditions. Its structure is based on leadership centered on the kiai, traditions of devotion, values of etiquette, one-way communication, and social structures that place the kiai in a high social position based on knowledge and spirituality, while the santri are below them, whose role is to show respect and loyalty. (2) The culture of feudalism in Islamic boarding schools is evident in the form of leadership, social relations, and religio-feudalism, which is feudalism based on religion. (3) The factors contributing to the persistence of feudalism in Islamic boarding schools stem from the ideological commitment of the kiai (religious leaders) to preserve the purity of the salaf or traditional style, as well as the acceptance of this social structure by the santri (students).

Keywords: Feudalism, Islamic Boarding Schools, Hierarchical Structure

Abstrak

Pesantren salaf merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang menempatkan kiai pada posisi sentral. Dominasi ini memunculkan kekhawatiran adanya pola relasi hierarkis yang dianggap sebagai bentuk feodalisme, terutama setelah maraknya kasus kekerasan di lingkungan pesantren. Minimnya kajian akademik terkait isu ini mendorong dilakukannya penelitian untuk menelaah keberadaan dan bentuk budaya feodalisme di pesantren. Penelitian ini bertujuan (1) mengeksplorasi eksistensi budaya feodalisme di pondok pesantren Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan; (2) mendeskripsikan bentuk-bentuk budaya feodalisme di pondok pesantren Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan; dan (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan budaya feodalisme bertahan di pondok pesantren Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subjek penelitian berjumlah 9 orang informan yang berasal dari 3 pondok pesantren salaf di Kecamatan Kadugede. Informan meliputi kiai/pimpinan pesantren, pengurus, dan santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Eksistensi feodalisme di pesantren berakar dari tradisi pesantren klasik. Strukturnya bertumpu pada kepemimpinan yang terpusat pada kiai, tradisi pengabdian, nilai adab, komunikasi satu arah, serta struktur sosial, yang menempatkan kiai pada posisi sosial yang tinggi atas dasar keilmuan dan spiritualitas, sedangkan santri berada di bawahnya, yang berperan untuk hormat dan menunjukkan loyalitas. (2) Budaya feodalisme di pondok pesantren tampak dalam bentuk kepemimpinan, hubungan sosial, dan bentuk religio-feodalisme, yaitu feodalisme yang didasarkan pada agama. (3) Faktor keberlangsungan budaya feodalisme di pesantren bersumber dari komitmen ideologis pihak kyai yang ingin menjaga kemurnian corak salaf atau tradisional, serta penerimaan dari pihak santri terhadap struktur sosial tersebut.

Kata Kunci: Feodalisme, Pondok Pesantren, Struktur Hierarkis

Copyright (c) 2023 Aditiya Rawandi

✉ Corresponding author: Aditiya Rawandi

Email Address: adityarawandi@gmail.com (Jl. Mayasih No.11, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan, Jawa Barat)

Received 05 Desember 2023, Accepted 15 Desember 2023, Published 28 Desember 2023

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi salah satu fondasi keberlangsungan suatu negara, karena pendidikan berperan membentuk sumber daya manusia yang dibutuhkan. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dilakukan secara formal, informal, dan non formal. Pendidikan formal dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Pendidikan informal diselenggarakan di ruang lingkup keluarga dan kegiatan belajar mandiri. Pendidikan non formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Salah satu pendidikan non formal yang diakui di Indonesia adalah pondok pesantren (Syaadah et al., 2023).

Pesantren salaf, demikian istilah ini disematkan bagi pondok pesantren yang masih mempertahankan sistem pendidikan tradisionalnya dengan fokus memahami ajaran agama, mengkaji buku-buku atau kitab klasik, dan ciri khas kesederhanaan lingkungannya. Pesantren yang telah beradaptasi dengan sistem pendidikan modern, kemudian disebut dengan pesantren modern atau pesantren khalaf (Setiawan et al., 2025). Meski dibedakan dengan istilah tradisional dan modern, secara umum keduanya tetap mempunyai tujuan sama, yaitu tafaqquh fiddin atau memahami ajaran dan nilai-nilai agama secara mendalam.

Selain lingkungan yang bercorak akademik, yang mana dalam hal ini para santri dituntut untuk belajar, membaca dan berdiskusi di luar jadwal pembelajaran, pesantren juga berusaha menghadirkan lingkungan pembiasaan, yaitu santri dituntut terbiasa disiplin, beribadah, dan saling mengayomi (Wahyudi et al., 2023). Idealnya pesantren juga memiliki lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang sejalan dengan makna

Islam itu sendiri yang bermakna keselamatan. Islam diakui sebagai agama rahmatan lil alamin, yang berarti memberikan rahmat bagi seluruh alam (Natsir & Rohman, 2024). Namun nyatanya pada hari ini tidak semua pesantren memiliki lingkungan tersebut dan hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap pesantren menjadi turun.

Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pesantren disebabkan karena maraknya pemberitaan mengenai tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkapkan kasus kekerasan di lembaga pendidikan terus meningkat sejak tahun 2020. Pada tahun 2024 sendiri tercatat 573 kasus kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan. Jumlah ini mengalami peningkatan 2 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Dari 573 jumlah kasus tersebut 20% nya atau 114 kasus terjadi di pondok pesantren. Berikut merupakan data kekerasan yang terjadi di pondok pesantren sepanjang tahun 2024.

Tabel 1. Kasus Kekerasan di Pondok Pesantren

Wilayah	Jumlah Kasus	Jenis Kekerasan
Jawa Barat	36 kasus	Kekerasan seksual & fisik
Jawa Timur	28 kasus	Kekerasan seksual & bullying
Jawa Tengah	17 kasus	Kekerasan fisik & psikis
Banten	9 kasus	Perundungan

Sumatera Barat	8 kasus	Kekerasan seksual
NTB	6 kasus	Kekerasan psikis
Kalimantan Selatan	5 kasus	Kekerasan fisik

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2024 kasus kekerasan di pondok pesantren paling banyak terjadi di Jawa Barat. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jenis kekerasannya sendiri berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Contoh kasus kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren di Jawa Barat diantaranya adalah kasus kekerasan seksual oleh oknum pengasuh kepada 13 Santriwati di Bandung dan kasus kekerasan seksual oleh oknum guru di salah satu pondok pesantren di Cirebon. Pada kasus yang terjadi di Cirebon ini dikatakan bahwa ada indikasi korban diiming-imingi sesuatu, kemudian merasa ketakutan karena pelaku adalah sosok guru, yang dalam pikiran anak merupakan figur yang harus diteladani. Hal ini bisa membuat korban menurut tanpa berani melawan (Irwanto, 2025). Selain itu, kekerasan seksual dan kekerasan fisik juga terjadi di beberapa Pondok Pesantren di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hazmin & Zain (2024) mengungkapkan salah faktor rentannya kekerasan di dunia pesantren adalah karena adanya hierarki sosial yang menempatkan pelaku (yang merupakan pengasuh atau senior) pada posisi yang tinggi dan memiliki otoritas yang rentan disalahgunakan. Demikian kemudian masyarakat mengistilahkannya dengan feodalisme. Isu feodalisme akhir-akhir ini menjadi perbincangan masyarakat sebagai respon atas menyebarnya informasi berupa video yang memperlihatkan aktivitas di Pesantren.

Aktivitas ini dianggap mengindikasikan bahwa budaya feodalisme masih ada di pesantren. Ditambah juga dengan banyaknya pemberitaan dan artikel online yang memperkuat stigma tersebut (Abbas, 2025). Dalam konteks ini feodalisme diartikan sebagai sistem hierarki yang memberikan otoritas yang kuat terhadap seseorang yang berada pada status sosial tinggi dan orang yang berada di bawahnya harus selalu patuh. Feodalisme ini dapat membatasi daya kritis (Iddian, 2022). Sistem ini dipercaya merupakan warisan dari era kolonialisasi dan pada hari ini banyak masyarakat yang berasumsi bahwa pesantren tradisional (salaf) menerapkan sistem tersebut.

Masyarakat menganggap budaya feodalisme masih berlaku di pesantren salaf karena posisi kiai yang sangat dominan. Ia tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga dianggap sebagai pemilik pesantren, dengan kewenangan penuh dalam mengatur segala hal. Arah dan tujuan pesantren sangat dipengaruhi oleh visi pribadi kiai (Anugrah et al., 2022). Sistem manajemen pesantren salaf mengikuti pola kepemimpinan kiai yang menyerupai raja dalam sebuah kerajaan, dengan otoritas mutlak atas seluruh kegiatan pesantren (Tobroni & Firmansyah, 2022). Tradisi pesantren salaf juga ditandai oleh penghormatan tinggi kepada kiai, sebagaimana digariskan dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang mengatur etika hubungan antara santri dan kiai (Setiawan et al., 2025). Secara kasat mata, fenomena ini memiliki kemiripan dengan praktik feodalisme. Penyematan istilah feodalisme pada sistem kepemimpinan pondok pesantren tradisional yang sedemikian rupa menimbulkan pihak yang pro dan kontra (Benhil, 2025).

Pihak yang pro mengatakan maraknya kasus kekerasan di Pondok Pesantren, korban yang merasa tidak berkuasa untuk melawan, hubungan patron-klien dan bentuk adab yang mereka kira berlebihan sudah cukup membuktikan bahwa budaya feodal masih berlaku (Zuhri, 2025). Pihak yang kontra (kebanyakan dari kalangan pesantren sendiri) menjelaskan bahwa di pondok pesantren tidak ada budaya feodalisme. Mereka mengatakan bahwa sistem sosial di Pondok Pesantren lebih ke arah meritokrasi, yaitu bentuk pengakuan dan loyalitas kepada pemimpin atau atasan didasarkan pada kemampuan, kompetensi, dan prestasi individu. Tidak seperti feodalisme yang mendasarkan loyalitas terhadap latar belakang sosial, kekayaan, atau koneksi (Labib, 2025). Pembahasan-pembahasan oleh pihak yang pro dan kontra kebanyakan dilakukan melalui opini-opini yang disebarakan secara daring melalui media massa dan media sosial. Oleh karena itu, peneliti mencoba mengeksplorasi keberadaan budaya feodalisme di pondok pesantren.

Kecamatan Kadugede merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan. Dari segi sosial budaya, masyarakat di Kecamatan Kadugede menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan tradisi lokal. Hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat cukup erat, dengan pengaruh kuat dari tokoh agama dan pimpinan pesantren yang dihormati. Pemilihan Kecamatan Kadugede sebagai lokasi penelitian didasarkan pada keberadaan beberapa pesantren salaf yang masih memegang kuat tradisi lama, sehingga relevan untuk mengkaji sejauh mana budaya feodalisme masih dipertahankan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pola kepemimpinan dan hubungan sosial di lingkungan pesantren.

Berangkat dari kondisi tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan eksistensi budaya feodalisme dalam kehidupan sosial di pondok pesantren salaf; (2) mengidentifikasi bentuk-bentuk feodalisme yang masih bertahan di lingkungan pesantren; dan (3) menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan budaya feodalisme tetap bertahan di pesantren. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap studi pendidikan Islam dan kajian sosial pesantren, serta menjadi bahan refleksi dalam memahami dinamika relasi antara kiai dan santri di era modern, tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional yang telah mengakar kuat dalam sistem pendidikan pesantren salaf.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus dipilih karena penelitian ini berusaha memahami secara mendalam fenomena budaya feodalisme yang terjadi di lingkungan pondok pesantren di Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Studi kasus memungkinkan peneliti menggambarkan secara menyeluruh pola relasi sosial antara kiai dan santri serta nilai-nilai budaya yang berkembang dalam konteks tertentu. Lokasi penelitian dilaksanakan di tiga pesantren tradisional di Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Pesantren-pesantren tersebut dipilih karena merupakan pesantren yang bercorak tradisional serta memiliki karakteristik khas dalam pola hubungan antara kiai, ustadz, dan santri. Selain itu, ketiga pesantren tersebut berlokasi cukup jauh dari pusat Kecamatan Kadugede, sehingga dinilai masih mempertahankan nilai-nilai dan budaya pesantren. Subjek penelitian terdiri dari 9 informan yang meliputi kiai/pimpinan pesantren, pengurus,

dan santri. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif informan dalam kehidupan sehari-hari pesantren, baik dalam kegiatan pembelajaran, kedekatan dengan kiai, maupun aktivitas keagamaan di lingkungan pondok.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode utama, yaitu: (1) Observasi, dilakukan untuk mengamati secara langsung dinamika kehidupan sosial di pesantren, termasuk pola interaksi antara kiai dan santri, pelaksanaan kegiatan pembelajaran kitab kuning, serta aktivitas harian santri. (2) Wawancara mendalam, dilakukan secara semi-terstruktur kepada para kiai dan santri guna menggali pandangan, pengalaman, serta praktik sosial yang berkaitan dengan pola kepemimpinan, relasi sosial, dan budaya pesantren. (3) Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa catatan lapangan, profil pesantren, foto kegiatan, serta dokumen lain yang relevan dengan konteks penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, yakni proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data, dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif berdasarkan temuan lapangan, disusun secara tematik sesuai dengan dimensi dan indikator yang telah ditetapkan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilakukan melalui interpretasi mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan, serta pengecekan ulang terhadap keakuratan temuan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yakni dengan membandingkan data hasil wawancara dari berbagai informan, hasil observasi langsung di lingkungan pesantren, serta dokumen pendukung. Validitas data diperkuat dengan diskusi bersama rekan sejawat dan pengumpulan data dari beberapa pondok pesantren salaf sebagai subjek penelitian, agar hasil yang diperoleh bersifat objektif, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun dimensi dan indikator dari penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. Dimensi dan Indikator

Dimensi	Indikator
Kepemimpinan	Sentralisasi keputusan pada figur kiai Kiai merupakan sosok yang sakral Pewarisan kepemimpinan pesantren Pemanfaatan santri di luar pendidikan
Hubungan sosial	Adanya strata sosial Ketergantungan hidup santri terhadap kiai Komunikasi satu arah minimnya ruang diskusi
Pembatasan	Penolakan terhadap kritik dan inovasi Tidak ada mobilitas sosial bagi santri

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Feodalisme di Pondok Pesantren

Feodalisme di lingkungan pesantren, khususnya pesantren salaf, memiliki ciri yang berbeda dengan feodalisme pada umumnya sebagaimana yang dikenal dalam sejarah sosial dan politik. Feodalisme klasik, seperti yang berkembang di Eropa atau pada masa kerajaan, biasanya ditandai

dengan sistem penguasaan berbasis ekonomi dan politik, di mana kekuasaan ditentukan oleh kepemilikan tanah, garis keturunan bangsawan, serta struktur sosial yang kaku dan diwariskan secara turun-temurun. Sebaliknya, feodalisme yang terjadi di pesantren tidak dibangun atas dasar kepemilikan sumber daya ekonomi atau jabatan politik, melainkan atas dasar simbolik dan spiritual. Kiai dalam pesantren tidak hanya berperan sebagai pemimpin lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai figur spiritual yang disakralkan oleh para santri. Kepatuhan santri terhadap kiai bukan karena tekanan ekonomi atau dominasi politik, melainkan karena adanya keyakinan bahwa kiai adalah perantara barokah dan sumber ilmu yang suci. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang dimiliki kiai bersifat simbolik-religius, bukan bersifat materialistik. Posisi kiai yang tinggi di mata santri dibentuk oleh penghormatan, tradisi ta'zim, serta internalisasi nilai-nilai kepesantrenan

yang ditanamkan secara turun-temurun.

Dengan demikian, eksistensi feodalisme di pesantren berakar dari tradisi pesantren klasik yang telah bertahan sejak lama dan berpadu dengan nilai-nilai Islam yang menekankan penghormatan terhadap guru sebagai pemberi ilmu. Relasi antara kiai dan santri membentuk pola patron-klien, yang dalam kajian sosial sering kali disandingkan dengan konsep feodalisme dalam ranah politik dan ekonomi. Namun demikian, struktur feodalisme di pesantren tidak bertumpu pada kepemilikan tanah atau dominasi ekonomi, melainkan pada kekuasaan simbolik dan spiritual yang dijaga melalui warisan tradisi, nilai adab, serta struktur sosial yang hierarkis. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Hakim (2023) yang menyatakan bahwa kepemimpinan kharismatik kiai (berpusat pada kiai), pola hubungan patron-klien, pensakralan kepada kiai, loyalitas santri, dan pembelajaran berbasis komunikasi personal-monolog merupakan tradisi pesantren tradisional yang telah ada sejak dahulu dari awal sistem pendidikan pesantren lahir.

Bentuk Feodalisme di Pondok Pesantren

Budaya feodalisme di pondok pesantren tampak jelas dalam dua bentuk utama, yaitu feodalisme kepemimpinan dan feodalisme dalam hubungan sosial. Feodalisme kepemimpinan tercermin dari sentralisasi otoritas pada sosok kiai, yang memiliki peran dominan dalam menentukan arah kebijakan, metode pembelajaran, hingga kehidupan pribadi santri. Bahkan, di beberapa pesantren, pola pewarisan kepemimpinan berlangsung secara turun-temurun kepada anak atau menantu kiai, yang menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak hanya berdasar pada kapasitas keilmuan, tetapi juga pada garis keturunan.

Selain dalam kepemimpinan, bentuk feodalisme juga terlihat dalam struktur sosial antara kiai dan santri, yang menunjukkan relasi hierarkis. Kiai diposisikan sebagai figur yang sakral, sementara santri menunjukkan loyalitas, ketundukan, dan ketergantungan. Pola komunikasi satu arah, absennya kritik, dan kecenderungan santri untuk tidak mempertanyakan kebijakan pesantren menunjukkan bahwa struktur sosial pesantren berjalan dalam kerangka relasi patron-klien. Baik dalam kepemimpinan maupun hubungan sosial, struktur feodal di pesantren tidak dibentuk atas dasar ekonomi atau kekuasaan politik, melainkan berlandaskan pada tradisi pesantren klasik dan nilai-nilai agama. Menjadikan sistem

sosial yang berjalan sebagai bentuk religio-feodalisme, yaitu feodalisme yang berakar pada otoritas keagamaan dan simbolik. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Rifa'i (2022) yang menyatakan bahwa pesantren memiliki bentuk religio-feodalisme. Seorang kiai selain menjadi pimpinan agama sekaligus merupakan traditional mobility dalam masyarakat feodal.

Faktor Bertahannya Feodalisme di Pondok Pesantren

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan budaya feodalisme tetap bertahan di lingkungan pesantren, khususnya pesantren salaf. Salah satu faktor utama yang ditemukan adalah adanya komitmen ideologis dari pihak kiai sebagai pemimpin utama pesantren. Kiai menyampaikan bahwa ia tetap mempertahankan sistem salaf karena merasa terikat secara emosional dan intelektual dengan tradisi tersebut. Ia merupakan lulusan pesantren salaf dan memiliki keyakinan bahwa pesantren yang benar-benar murni salafi sudah mulai langka, sementara pesantren modern dan campuran sudah sangat banyak jumlahnya. Oleh karena itu, ia menganggap bahwa mempertahankan corak salaf bukan sekadar pilihan manajerial, tetapi bagian dari misi menjaga kemurnian tradisi Islam.

Faktor lain yang turut mendukung bertahannya sistem feodal adalah penerimaan kultural dari para santri. Santri tidak merasa posisi mereka dalam struktur sosial pesantren sebagai bentuk penindasan, melainkan sebagai bagian dari adab dan jalan untuk meraih barokah. Kepatuhan kepada kiai tidak dianggap sebagai tekanan, tetapi justru sebagai wujud kesadaran dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Hal ini membuat struktur sosial yang hierarkis tetap berjalan secara natural dan tidak banyak dipersoalkan, baik oleh kiai maupun oleh santri. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Weiss (2021) yang menyatakan bahwa tradisi dan struktur sosial bisa bertahan lama karena logika reproduksi sosial kolektif, yaitu praktik dan nilai yang terus diwariskan dari generasi ke generasi dan dipertahankan oleh aktor lokal.

Kepemimpinan

Kepemimpinan kiai di pondok pesantren salaf yang diteliti memperlihatkan pola yang sentralistik. Ini merupakan salah satu indikator feodalisme. Keputusan-keputusan penting dalam penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan kegiatan, dan penetapan kebijakan umumnya bersumber langsung dari kiai sebagai pemegang otoritas tertinggi

di pesantren. Dalam dua dari tiga pesantren yang diteliti, sistem pengambilan keputusan tidak melibatkan musyawarah pengurus secara formal, melainkan sepenuhnya ditentukan oleh kiai. Sedangkan salah satu pondok pesantren telah bertransformasi dari sentralisasi kepemimpinan menjadi lebih partisipatif, yaitu melibatkan santri dalam penentuan kebijakan. Dari dua pesantren tercermin karakter kepemimpinan yang berpusat pada figur tunggal. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Tobroni & Firmansyah (2022) yang menyatakan bahwa dalam sistem pesantren tradisional, kiai sering kali diposisikan sebagai figur tunggal yang memiliki kewenangan penuh layaknya seorang raja dalam kerajaan. Pesantren dianalogikan sebagai miniatur kerajaan dengan kiai sebagai pusat otoritas, tempat semua keputusan dan arah kelembagaan bersumber.

Para santri menempatkan kiai dalam posisi yang dihormati secara spiritual dan diyakini membawa barokah. Sikap ini bukan semata hasil penanaman nilai adab, melainkan sudah menjadi bagian dari sistem sosial yang menempatkan kiai di atas seluruh elemen lain dalam pesantren. Santri merasa bahwa kepatuhan terhadap kiai adalah bagian dari pencapaian keberkahan ilmu. Kiai dipandang sebagai intelektual agama yang secara spiritual memiliki kedekatan dengan Tuhan karena ilmu dan ibadahnya. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Rahman (2022) yang menyatakan bahwa praktik ngalap barokah (mencari berkah) dan pensakralan terjadi di pondok pesantren yang diteliti. Terdapat sejumlah hal yang dipandang memiliki nilai kesakralan, yakni sosok kiai dan benda-benda yang pernah dipakai kiai.

Pewarisan kepemimpinan pesantren menjadi indikator penting dari budaya feodal. Dalam sistem feodal kekuasaan diwariskan dalam lingkup terbatas, bukan melalui mekanisme pemilihan terbuka. Pada pondok pesantren yang diteliti, kepemimpinan diwariskan dari kiai pendiri kepada putranya atau kepada menantu laki-lakinya. Meskipun tidak selalu bersifat keturunan, proses pewarisan ini tetap menunjukkan bahwa kekuasaan di pesantren cenderung dipertahankan dalam lingkaran internal yang dekat dengan kiai, baik secara darah maupun loyalitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Djuwairiyah, dkk. (2024) yang menyatakan bahwa penerus pimpinan pesantren salaf dipilih oleh kiai dari keturunan atau kerabatnya yang memiliki kompetensi yang berasal dari pendidikan pesantren.

Santri tidak hanya mengikuti kegiatan belajar, tetapi juga menjalankan tugas di luar pembelajaran, seperti membersihkan rumah, mengurus kebun, kolam, hingga memelihara ternak milik kiai. Sekilas, ini tampak sebagai pemanfaatan tenaga tanpa imbalan finansial. Namun, baik kiai maupun santri memandangnya sebagai bagian dari proses pendidikan. Tugas-tugas tersebut dianggap sebagai pelatihan kedisiplinan, pengabdian, dan pembentukan karakter yang dikenal sebagai khidmah. Dalam tradisi pesantren, khidmah dipahami sebagai jalan mencari ilmu dan keberkahan melalui ta'zim kepada guru. Meski tanpa gaji, kebutuhan dasar santri seperti makan dan minum tetap dipenuhi oleh kiai. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Shalahuddin (2025) yang menyatakan bahwa khidmah di pondok pesantren tidak hanya dipahami sebagai bentuk pengabdian santri kepada kiai secara fisik, namun juga dimaknai sebagai jalan spiritual, wujud ibadah, rasa syukur, dan bentuk pengamalan ilmu yang holistik.

Hubungan Sosial

Secara sosial, kiai menempati posisi lebih tinggi daripada santri karena keilmuan, pengalaman, dan perannya sebagai pemimpin pesantren. Penghormatan santri terhadap kiai tidak hanya lahir secara spontan, tetapi juga diperkuat melalui kitab-kitab adab yang menekankan pentingnya ta'zim kepada guru. Hubungan ini bersifat timbal balik. Kiai

memberi ilmu, bimbingan, dan fasilitas; santri membalasnya dengan kepatuhan, loyalitas, dan pengabdian. Pola hubungan ini disebut patronase, yakni relasi antara dua pihak dengan status tidak seimbang, di mana kiai menjadi patron yang dihormati dan memberi banyak jasa, sementara santri sebagai klien bergantung pada kiai dalam aspek keilmuan, spiritual, dan sosial. Hal ini sejalan dengan

penelitian oleh Ramdan & Usman (2021) yang menyatakan bahwa hubungan yang terjalin antara kiai dan santri merupakan bentuk hubungan antara guru dan murid, yang dalam praktiknya menyerupai relasi antara seorang ayah dan anak, sekaligus mencerminkan pola patron-klien.

Ketergantungan santri kepada kiai bukan didasarkan pada ekonomi seperti pada feodalisme umum, melainkan didasarkan pada aspek keilmuan, spiritual, dan status sosial. Santri menganggap kiai sebagai sumber ilmu. Kiai menyatakan keilmuan santri perlu bersanad. Artinya pengetahuan dan pemahaman santri harus dikonfirmasi kepada kiai. Tidak boleh sembarang menafsirkan sendiri. Dalam konteks spiritual, santri menganggap kiai sebagai seseorang yang lebih dekat dengan Tuhan karena ilmu dan ibadahnya. Kiai diyakini membawa barokah yang dapat menyokong kesuksesan santri. Dalam hal status sosial, santri menghormati kiai karena posisinya yang juga dihormati oleh masyarakat sebagai tokoh penting. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Hermansyah (2022) yang menyatakan bahwa ketergantungan santri kepada kiai didasari oleh kiai yang dianggap memiliki tingkat keilmuan yang tinggi dan tirakatnya (usaha ibadahnya) melebihi santri.

Dalam hal komunikasi, sesama santri terjadi komunikasi dua arah. Ditandai oleh kedekatan hubungan antar santri dan adanya diskusi dalam bentuk pembelajaran (mudzakarah) dan musyawarah santri pengurus. Sedangkan, komunikasi antara santri dengan kiai, di dua pesantren ditemukan pola komunikasi yang cenderung satu arah, baik dalam penentuan kebijakan, kegiatan, dan pembelajaran. Sementara itu, di salah satu pesantren santri dilibatkan dalam penentuan peraturan dan kegiatan pesantren. Meskipun dalam hal pembelajaran masih berpusat pada kiai seperti pondok pesantren lainnya. Kecenderungan komunikasi satu arah ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Azizi (2023) yang menyatakan bahwa Komunikasi ustad kepada santri menunjukkan pola menasihati dan memerintah. Dalam berkomunikasi, ustad cenderung lebih leluasa dalam berbicara, karena ia sebagai tokoh yang mendominasi dalam pembicaraan. Hal itu dikarenakan ustad berada dalam posisi status sosial yang lebih tinggi daripada santri.

Indikator lain dalam dimensi hubungan sosial yang ditemukan dalam penelitian ini adalah minimnya ruang diskusi antara kiai dan santri, baik dalam konteks pembelajaran maupun pengambilan kebijakan pesantren. Di dua dari tiga pesantren yang diteliti, tidak ditemukan forum diskusi tersistem antara kiai dan santri. Pembelajaran berlangsung satu arah, dan keputusan penting ditentukan langsung oleh kiai tanpa pelibatan santri. Namun, di satu pesantren ditemukan praktik musyawarah pengurus bulanan, yang menjadi ruang diskusi internal meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan pimpinan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Alfikri (2024) yang menemukan bahwa pola komunikasi di pesantren tradisional umumnya bersifat instruktif dan menempatkan kiai sebagai satu-satunya sumber otoritas.

Pembatasan

Dalam budaya pesantren yang diteliti, sistem pembatasan terhadap santri tidak bersifat menyeluruh dan tertutup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pembatasan hanya tampak jelas

dalam hal kritik terhadap kiai. Dari sisi kritik, kiai menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima kritik dari santri. Namun, tetap

terbuka jika ada kritik yang disampaikan. Para santri secara eksplisit menyatakan bahwa mereka tidak pernah menyampaikan kritik kepada kiai. Alasannya, karena mereka sepenuhnya percaya dan hormat kepada kiai. Santri merasa tidak tahu apa yang harus dikritik dari kiai dan merasa bahwa mengkritik kiai adalah hal yang tabu. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Yasin & Khasbullah (2022), yang menunjukkan bahwa kuatnya kepercayaan dan penghormatan santri terhadap kiai menjadikan sikap patuh lebih dominan, sehingga ekspresi kritis jarang muncul dalam relasi santri dengan kiai.

Berbeda halnya dengan aspek inovasi. Para santri justru diberikan ruang yang luas untuk berinovasi, terutama dalam kegiatan-kegiatan non-akademik. Misalnya, pada perayaan Maulid Nabi, tafaruq, dan haflah imtihan, para santri diberi kebebasan untuk menyusun acara, menampilkan kreativitas, dan mendekorasi lingkungan pesantren tanpa intervensi langsung dari kiai. Bahkan, santri juga diperbolehkan mengikuti kegiatan di luar pesantren selama mereka mendapatkan izin dari pihak pesantren. Fakta ini memperlihatkan bahwa meskipun secara struktural tetap berada dalam kendali otoritas, santri tidak dikekang dalam mengekspresikan kreativitas dan pengembangan diri. Kebebasan santri untuk berinovasi ini sejalan dengan penelitian oleh Nurjanah & Amrullah (2021) yang menyatakan bahwa santri di pondok pesantren tidak hanya belajar mengenai ilmu-ilmu agama. Para santri juga mempelajari bekal keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi bagian dari masyarakat global, seperti daur ulang sampah, keterampilan pertanian dan perikanan.

Dalam hal mobilitas sosial, temuan penelitian menunjukkan bahwa santri tidak dikurung dalam status murid seumur hidup. Ketika seorang santri telah dianggap cukup secara keilmuan, ia akan dipercaya untuk membimbing santri junior atau bahkan mengajar santri lain. Dalam beberapa kasus, santri yang bukan dari keluarga kiai dapat menduduki posisi strategis di pesantren, seperti menjadi pengasuh, bahkan pimpinan pesantren, apabila telah menunjukkan kapasitas dan dedikasi yang tinggi. Ini memperlihatkan adanya unsur meritokrasi, di mana posisi tidak hanya ditentukan oleh keturunan, tetapi oleh kemampuan dan loyalitas. Hal ini tentu berbeda dari sistem feodalisme klasik yang menutup ruang mobilitas bagi orang-orang di luar garis keturunan bangsawan. Seorang santri tidak harus selalu menjadi pemuka agama tatkala kembali ke lingkungan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Indra & Alim (2024) yang menyatakan bahwa pesantren mendukung kebebasan santri dalam menentukan masa depannya. Setelah lulus dari pesantren, mereka tidak hanya menjadi guru agama saja, tetapi dapat berkarya di berbagai bidang kehidupan, seperti menjadi motivator pembangunan bahkan menjadi wirausahawan dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai budaya feodalisme di pondok pesantren Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 1) Eksistensi feodalisme di pesantren berakar dari tradisi pesantren klasik yang telah bertahan sejak lama dan berpadu

dengan nilai-nilai Islam. Struktur feodalisme bertumpu pada kekuasaan simbolik dan spiritual yang dijaga melalui warisan tradisi, nilai adab, serta struktur sosial yang hierarkis. 2) Budaya feodalisme di pondok pesantren tampak dalam dua bentuk utama, yaitu feodalisme kepemimpinan melalui sentralisasi otoritas, sakralitas, pewarisan kepemimpinan; dan feodalisme dalam hubungan sosial melalui stratifikasi sosial dan pola patron-klien. Struktur sosial yang bertingkat dan tradisi, yang keduanya bersandar pada keagamaan juga menandai adanya bentuk religio-feodalisme (feodalisme yang didasarkan pada agama) di pesantren. 3) Faktor keberlangsungan budaya feodalisme di pesantren bersumber dari komitmen ideologis pihak kyai yang ingin menjaga kemurnian corak salaf atau tradisional, serta penerimaan dari pihak santri terhadap struktur sosial tersebut. Hal ini menimbulkan struktur sosial dan nilai yang ada di pesantren yang terus diwariskan dari generasi ke generasi dan dipertahankan oleh aktor lokal.

REFERENSI

- Alfikri, R. (2024). Metode Komunikasi Pengasuh Pondok Dalam Membina Akhlak Santri Di Pondok Pesantren Al-Fattah Talang Padang Tanggamus. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Anugrah, A., Amrullah, A. M. K., & Esha, M. I. (2022). Tipologi manajemen tradisional dan modern dan klasifikasinya dalam manajemen pendidikan islam. *Journal of Islamic Education : The Teacher of Civilization*, 3(1). <https://doi.org/10.30984/jpai.v3i1.1792>
- Azizi, M. R. (2023). Pola Komunikasi Santri Dan Ustad Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi. *Jurnal Peneroka*, 3(2), 172–183. <https://doi.org/10.30739/peneroka.v3i2.2292>
- Benhil, M. M. A. (2025, February 13). Feodalisme dalam Pendidikan Islam Tradisional: Antara Penghormatan dan Kultus Individu. MAB. <https://masjidalfalahbenhil.com/blog/2025/02/13/feodalisme-dalam-pendidikan-islam-tradisional-antara-penghormatan-dan-kultus-individu/>
- Djuwairiyah, D., Jamil, A. I., & Kadir, F. A. A. (2024). Kepemimpinan kiai pondok pesantren salafiyah syafi'iyah sukorejo terhadap transformasi pendidikan islam. *Lisan al-hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 18(2), 338–359. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i2.338-359>
- Hakim, L. (2023). Pesantren as the Identity of Islamic and Cultural Education in West Java. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 4578–4586. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i4.3369>
- Hazmin, M. M., & Zain, Z. (2024). Pesantren di tengah kontroversi; upaya rekonstruksi kepercayaan masyarakat terhadap pesantren di era modern. *Shibghoh: Prosiding Ilmu Kependidikan UNIDA Gontor*, 3.
- Hermansyah, W. G. (2022). Pola Hubungan Patron-Klien Kiai Dan Santri Dalam Pendidikan Islam Di Pesantren Luhur Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Iddian, S. (2022). Warisan Feodalisme Dalam Pendidikan. *Arriyadhah*, 19(1), 34–43.
- Indra, H., & Alim, A. (2024). pesantren as a formative institution for the intellectual and moral development of santri for indonesia's development. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(4), 861–874.
- Irwanto, D. (2025). Seorang Guru di Ponpes Cirebon Diduga Lecehkan Santri. *Metro TV*.
<https://www.metrotvnews.com/read/bmRCELZ5-seorang-guru-di-ponpes-cirebon-diduga-lecehkan-santri>
- Labib, M. M. (2025, February 18). Pesantren dan Tuduhan Feodalisme. *NU Online*.
<https://jateng.nu.or.id/opini/pesantren-dan-tuduhan-feodalisme-MAiCT>
- Natsir, A., & Rohman, K. (2024). Kekerasan di Pondok Pesantren: Aktor, Motif, dan Sebaran Geografis. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(01), 1–18.
<https://doi.org/10.21274/dinamika.2024.24.01.1-18>
- Nurjanah, S., & Amrullah, M. K. (2021). Inovasi Pesantren Dalam Membentuk Kemandirian Lembaga Dan Santri. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 9(01), 137. <https://doi.org/10.32332/nizham.v9i01.3417>
- Rahman, M. A. (2022). Ngalap Barokah Minuman Bekas Kiai Kajian Living Hadis Teori Sosial Emile Durkheim. *Musala : Jurnal Pesantren dan Kebudayaan Islam Nusantara*, 1(2), Article 2.
<https://doi.org/10.37252/jpkin.v1i2.172>
- Ramdan, A., & Usman, M. (2021). Pola Interaksi dan Komunikasi Kiai terhadap Santri di Pesantren Sirnarasa. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf*, 3(1), 56–85.
<https://doi.org/10.53401/iktsf.v3i1.37>
- Rifa'i, D. A. (2022). Optimalisasi Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Kualitas Santri Pondok Pesantren Madarijul Ulum Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Rohani, R. (2024). Transformasi relasi kiai dan santri dalam tradisi pesantren. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 24(2), Article 2. <https://doi.org/10.32699/mq.v25i2.8208>
- Setiawan, A., Saifi, A. F. Z., Komala, E., Susilawati, E., & Adam, D. K. (2025). Tipologi dan dinamika pondok pesantren. *Naafi: jurnal ilmiah mahasiswa*, 2(1), Article 1.
<https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i1.111>
- Shalahuddin, M. (2025). Aktualisasi Konsep Khidmah di Pondok Pesantren (Studi kasus di Pondok Pesantren Al-Mardliyah Bahrul Ulum Tambakberas Jombang). *Mujalasat: Multidiciplinary Journal of Islamic Studies*, 3(1), Article 1.
- Syaadah, R., Ary, M. H. A. A., Silitonga, N., & Rangkuty, S. F. (2023). Pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. *Pema (jurnal pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat)*, 2(2), 125–131. <https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>
- Tobroni, T., & Firmansyah, E. (2022). Tipologi manajemen tradisional dan modern dalam perkembangan pendidikan pesantren. *Research and Development Journal of Education*, 8(1), 333. <https://doi.org/10.30998/rdje.v8i1.13087>

- Wahyudi, A., Mahfuds, Y., & Machmud, W. S. (2023). Implementation Of Multicultural Education Values In Islamic Boarding School. *Fenomena*, 22(1), 85–92. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v22i1.127>
- Weiss, H. (2021). Social Reproduction. *Cambridge Encyclopedia of Anthropology*. <https://doi.org/10.29164/21socialrepro>
- Yasin, M., & Khasbulloh, M. N. (2022). Constructing Ethical Critical Thinking at Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 127–144. <https://doi.org/10.15575/jpi.v8i2.19028>
- Zuhri, M. (2025, March 19). Bias Feodalisme dalam Bingkai Pesantren—Bedug. <https://bedug.net/2025/03/19/bias-feodalisme-dalam-bingkai-pesantren/>,